

30 WAMEN RANGKAP KOMISARIS DI BUMN

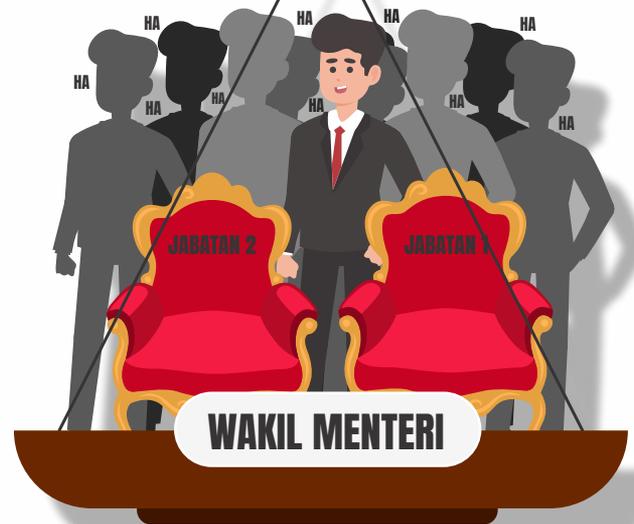
- **Sudaryono** – Wamen Pertanian → Komisaris Utama Pupuk Indonesia
- **Immanuel Ebenezer** – Wamen Ketenagakerjaan → Komisaris Pupuk Indonesia
- **Giring Ganesha** – Wamen Kebudayaan → Komisaris GMF Aero Asia
- **Angga Raka Prabowo** – Wamen Komdigi → Komisaris Utama Telkom
- **Ossy Dermawan** – Wamen ATR/BPN → Komisaris Telkom
- **Silmy Karim** – Wamen Imigrasi → Komisaris Telkom
- **Fahri Hamzah** – Wamen Perumahan → Komisaris BTN
- **Suhasil Nazara** – Wamen Keuangan → Komisaris PLN
- **Aminuddin Ma'ruf** – Wamen BUMN → Komisaris PLN
- **Kartika Wirjoatmodjo** – Wamen BUMN → Komisaris Utama BRI
- **Helvy Yuni Moraza** – Wamen UMKM → Komisaris BRI
- **Diana Kusumastuti** – Wamen PUPR → Komisaris Utama Brantas Abipraya
- **Yuliot Tanjung** – Wamen ESDM → Komisaris Bank Mandiri
- **Didit Herdiawan** – Wamen Kelautan → Komisaris Utama Perikanan Indonesia
- **Suntana** – Wamen Perhubungan → Komisaris Utama Pelindo
- **Dante Saksono** – Wamen Kesehatan → Komisaris Pertamina Bina Medika
- **Donny Ermawan** – Wamen Pertahanan → Komisaris Utama Dahana
- **Christina Aryani** – Wamen BP2MI → Komisaris Semen Indonesia
- **Ratu Isyana** – Wamen Kependudukan → Komisaris Dayamitra Telekomunikasi
- **Juri Ardiantoro** – Wamen Setneg → Komisaris Utama Jasa Marga
- **Nezar Patria** – Wamen Komdigi → Komisaris Utama Indosat
- **Veronica Tan** – Wamen PPA → Komisaris Citilink
- **Taufik Hidayat** – Wamenpora → Komisaris PLN EPI
- **Arif Havas Oegroseno** – Wamenlu → Komisaris Pertamina Shipping
- **Ferry Juliantono** – Wamen Koperasi → Komisaris Pertamina Patra Niaga

IRONI! 30 WAMEN RANGKAP JABATAN, RIBUAN RAKYAT CARI PEKERJAAN



- **Diaz Hendropriyono** – Wamen LHK → Komisaris Utama Telkomsel
- **Ahmad Riza Patria** – Wamen Desa → Komisaris Telkomsel
- **Dyah Roro Esti** – Wamen Perdagangan → Komisaris Utama Sarinah
- **Todotua Pasaribu** – Wamen Investasi → Wakomut Pertamina
- **Stella Christie** – Wamen Pendidikan Tinggi → Komisaris Pertamina Hulu Energi

Irani, di tengah rakyat masih sulit mendapatkan pekerjaan bahkan banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), 30 wakil menteri (wamen) aktif diketahui merangkap jabatan sebagai komisaris maupun komisaris utama di berbagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kondisi ini memicu sorotan publik, terutama terkait efektivitas kinerja mereka dalam menjalankan tugas pemerintahan. Kata Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam. Terbaru, Wamen yang merangkap posisi komisaris di BUMN, yaitu Taufik Hidayat, Wamen Pemuda dan Olahraga, juga sebagai komisaris di PT PLN Energi Primer Indonesia; Stella Christie, Wamen Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, juga sebagai komisaris di PT Pertamina Hulu Energi; Arif Havas Oegroseno, Wamen Luar Negeri, sebagai komisaris di PT Pertamina International Shipping; serta Ferry Juliantono, Wamen Koperasi, komisaris di PT Pertamina Patra Niaga.



JUMLAH ANGKATAN KERJA & PENGANGGURAN 2025

Jumlah Angkatan Kerja	Tambahan Angkatan Kerja	Kasus PHK (versi Kemenaker)	Kasus PHK (versi Apindo)	Kasus PHK (versi Buruh)
>149 juta orang	+2-3 juta orang (Menurut Apindo)	26.455 kasus (hingga 20 Mei)	73.992 kasus (hingga 10 Maret)	±70.000 kasus (hingga Mei)

PRESIDEN PRABOWO CAPAI KESEPAKATAN IEU-CEPA

Presiden RI Prabowo bertemu dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di markas Komisi Eropa, Brussels, Belgia, Minggu (13/7/2025). Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo dan Presiden von der Leyen mengumumkan Indonesia dan Uni Eropa berhasil mencapai kesepakatan politik dan telah merampungkan perundingan perjanjian kerja sama Indonesia Uni Eropa Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) setelah negosiasi itu berjalan selama kurang lebih 10 tahun.

Presiden Prabowo menekankan Indonesia melihat Eropa sebagai mitra yang penting. Oleh karena itu, Prabowo menginginkan lebih banyak kehadiran dan peran Eropa dalam perekonomian Indonesia. "Kami melihat Eropa masih memimpin di banyak aspek kehidupan dan kami banyak melihat ke Eropa. Mungkin, banyak dari kita yang enggan mengakuinya secara terbuka, tetapi saya di sini, mengatakan secara terbuka, kami ingin melihat Eropa yang lebih kuat," kata Presiden Prabowo.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto dalam menyelesaikan proses negosiasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) antara Indonesia dan Uni Eropa.

"Saya dengan senang hati mengumumkan bahwa kita baru saja mencapai kesepakatan politik terkait sebuah perjanjian perdagangan bebas yang ambisius, yaitu Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA). Setelah 10 tahun perundingan, kita berhasil mencapai terobosan besar. Bapak Presiden, saya mengucapkan terima kasih atas kepemimpinan Anda," ujar Ursula.

Dia menambahkan, tercapainya kesepakatan ini merupakan sinyal kuat bahwa kedua belah pihak

berkomitmen membangun hubungan jangka panjang berdasarkan prinsip saling percaya dan nilai bersama.

Presiden Ursula menilai Indonesia dan Uni Eropa telah mengirimkan pesan yang kuat kepada dunia bahwa kerja sama, keterbukaan, dan saling berbagi peluang merupakan jalan yang perlu diambil oleh negara-negara daripada mempertajam perbedaan dan perpecahan.

"Bersama-sama, kita mengirimkan pesan kuat mengenai pentingnya kemitraan jangka panjang yang dapat diprediksi, yang dibangun atas dasar kepercayaan, saling menghormati, transparansi, dan nilai-nilai bersama," ucap dia.

"Bapak Presiden, terima kasih atas kunjungannya. Pesan yang kita kirim hari ini kuat dan jelas. Beberapa memilih jalan isolasi dan perpecahan pada masa-masa sulit. Eropa dan Indonesia memilih jalan yang berbeda. Kita memilih keterbukaan, kerja sama, dan menjajaki peluang bersama," katanya.

"Anda selalu diterima di sini, dan Anda dapat mengandalkan Eropa," kata Presiden Komisi Eropa kepada Presiden Prabowo.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia dan Komisi Uni Eropa secara intensif terus melakukan pembahasan bersama guna mengakselerasi penyelesaian IEU-CEPA. Kesepakatan ini diharapkan dapat membuka peluang bisnis yang lebih luas, meningkatkan kepastian hukum, serta menyediakan platform strategis



Presiden RI Prabowo Subianto (kiri) dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen berjabat tangan dalam pernyataan bersama di Brussels, Belgia, Minggu (13/7/2025). (ANTARA/Fathur Rochman)

untuk memperdalam dialog dan kerja sama di berbagai isu ekonomi penting yang relevan saat ini.

"Meski dinamika perdagangan global saat ini

masih dihadapkan dengan ketidakpastian, kedua belah pihak kembali menegaskan komitmen untuk membangun dan meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi yang berbasis aturan dan saling menghormati. Kesepakatan melalui IEU-CEPA ini juga diyakini akan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan perdagangan dan investasi bilateral yang saling menguntungkan," katanya.

Airlangga mengatakan Indonesia dan Uni Eropa juga menyadari pentingnya percepatan implementasi perjanjian IEU-CEPA, mengingat urgensi untuk menciptakan stabilitas dan memperluas akses pasar serta memperkuat hubungan ekonomi yang saling menguntungkan dan membangun kemitraan strategis yang dapat diandalkan. Proses perundingan CEPA saat ini telah mencapai finalisasi isu-isu teknis, fine-tuning, dan menyusun kerangka waktu yang lebih detail untuk mencapai tahap ratifikasi IEU-CEPA.

"Sebelumnya banyak hal, tapi tentu situasi global, geopolitik itu semuanya merubah. Dan juga termasuk Indonesia menjadi mitra strategis untuk Eropa. Karena kita dilihat juga dalam proses masuk menjadi OECD, sehingga kita dianggap sudah mulai menjadi like-minded countries. Kemudian Indonesia juga ke depan akan menjadi negara yang terus meningkatkan ekonominya," ujar Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menegaskan bahwa kesepakatan IEU-CEPA diselenggarakan dalam skema yang saling menguntungkan dan mengedepankan kepentingan kedua belah pihak. Sementara itu, hubungan dagang Indonesia-Uni Eropa terus menunjukkan perkembangan signifikan dengan nilai perdagangan mencapai USD30,1 miliar pada 2024. Surplus perdagangan Indonesia terhadap Uni Eropa juga meningkat pesat, mencapai USD4,5 miliar pada 2024 atau naik dari USD2,5 miliar dari tahun sebelumnya.

"Dan mereka melihat di berbagai regional, ASEAN sangat kuat dan anchor-nya Indonesia. Sesudah Indonesia, di belakang antri nih, Malaysia ingin, Thailand ingin. Jadi Indonesia menjadi pelopor lah untuk bekerja sama dengan berbagai negara itu," pungkas Menko Airlangga. (fsr)

Sementara itu, selain agenda bersama Uni Eropa, Presiden juga direncanakan melakukan pertemuan dengan Raja Belgia Philippe di Istana Laeken. Pertemuan ini menjadi langkah diplomatik yang strategis bagi Indonesia guna mengembangkan dan memperkuat hubungan strategis di antara kedua negara serta mendalami dan menjajaki potensi kerja sama konstruktif di antara Indonesia dan Belgia dalam berbagai bidang.

Secara keseluruhan, Kunjungan kerja ke Belgia ini merupakan langkah diplomasi Pemerintah Indonesia untuk turut mengambil peran penting dalam menghadapi tantangan dan permasalahan global. (ant,rls/lut)



Meski dinamika perdagangan global saat ini masih dihadapkan dengan ketidakpastian, kedua belah pihak kembali menegaskan komitmen untuk membangun dan meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi yang berbasis aturan dan saling menghormati. Kesepakatan melalui IEU-CEPA ini juga diyakini akan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan perdagangan dan investasi bilateral yang saling menguntungkan,"

AIRLANGGA HARTARTO

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian



Sekretaris Steering Committee Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Beny Papa (kanan). (SPI)

HASIL SEMENTARA E-VOTING CAKETUM PSI, KAESANG KALAH

Berdasarkan hasil sementara e-voting calon ketua umum (caketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) periode 2025-2030, Kaesang Pangarep kalah dari Ronald Aristone Sinaga (Bro Ron), dan di posisi ketiga ada Agus Mulyono Herlambang. Meski demikian, hasil akhir perolehan suara akan diumumkan pada Kongres PSI pada 19-20 Juli 2025 di Solo, Jawa Tengah.

Pelaksana tugas Ketua Umum PSI, Andy Budiman, menuturkan pemilihan Ketua PSI akan berlangsung mulai 12-18 Juli 2025. "Saya tengok itu yang nomor satu itu Bro Ron," kata Andy Budiman dikutip Minggu (13/7/2025).

Selanjutnya, posisi kedua ditempati putra bungsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep. Disusul Agus Mulyono Herlambang di posisi ketiga. "Nomor 2 saya lihat Mas Kaesang, nomor 3 Bro Agus," ungkap dia.

Dia menyebut, hasil e-voting caketum PSI yang masih bersifat sementara ini bisa saja berubah dalam beberapa waktu. Bisa saja, kata Andy, Agus Mulyono atau Kaesang menyusul di posisi pertama.

"Tapi itu sementara, sekali lagi, kita masih belum tahu. Nanti mungkin Bro Agus nyusul, Mas Kaesang nyusul, belum tahu juga," ujarnya.

Dia menandakan bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Raya Ketua Umum mencapai 187.306 orang. Sementara

itu, hingga Sabtu (12/7/2025), lebih dari 10 ribu kader sudah memilih calon ketua umum PSI. Adapun proses e-vote dapat dilakukan dengan mengunjungi situs web vote.psi.id, yang akan dimulai pada 12 hingga 18 Juli 2025.

"Data tersebut yang berhasil kami verifikasi sampai Kamis 10 Juli pukul 00.00 WIB. Jadi ada 187.306 anggota PSI yang berhak untuk memilih Ketua Umum dalam Pemilihan Raya," kata Sekretaris Steering Committee Kongres PSI, Benidiktus Papa.

"Seluruh anggota yang masuk DPT dapat memberikan suaranya secara daring untuk memilih Ketua Umum PSI yang baru melalui situs vote.psi.id. Tata cara memilih juga sangat muda sehingga semua anggota bisa menggunakan haknya dengan baik. Kami menghimbau seluruh anggota yang sudah terverifikasi agar menggunakan hak suaranya sebelum batas waktu 18 Juli pukul 00.00 WIB," ungkap Beny.

Kontestasi di internal PSI itu akan diikuti oleh tiga caketum. Pertama adalah caketum nomor urut 1, Ronald A. Sinaga atau Bro Ron yang mendaftar pada Rabu (18/6/2025). Ia mendapatkan dukungan dari enam Dewan Pimpinan Wilayah

(DPW) PSI dan 36 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI.

Kemudian, Kaesang Pangarep sebagai petahana mendaftar pada Sabtu (21/6/2025) dan mendapat nomor urut 2. Putra bungsu Joko Widodo (Jokowi) itu mendapatkan dukungan dari 10 DPW PSI dan 78 DPD PSI.

Nama caketum PSI terakhir adalah Agus Mulyono Herlambang yang mendapatkan nomor urut 3. Sebanyak enam DPW PSI dan 24 DPD PSI menyatakan dukungan terhadapnya.

Sementara itu, PSI juga akan meluncurkan logo baru dan mengumumkan ketua umum baru pada kongres di Solo, Jawa Tengah (Jateng), pada 19-20 Juli 2025 mendatang. PSI juga akan mengundang Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden RI, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Ini menjadi satu kegembiraan bagi kami di DPP PSI bawah metode yang kami lakukan untuk memilih calon ketua umum dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anggota, mendapat respons yang luar biasa," ujar Beny.

Kongres PSI rencananya akan dilaksanakan di dua tempat. Hari pertama pada Sabtu (19/7/2025), Kongres digelar di Gedung Graha Saba Buana, Kecamatan Banjarsari. Kemudian hari pamungkas pada Minggu (20/5/2025), Kongres PSI akan

digelar di Gedung Auditorium KH Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).

Ketua Ketua Steering Committee Kongres PSI, Andy Budiman menjelaskan, forum tersebut juga menjadi tempat bagi partainya untuk mengumumkan logo baru. Logo dan warna baru, kata Andy, merupakan bagian dari rebranding kepartaian.

"Selain pertama kalinya kami melaksanakan satu pemilihan ketua umum secara terbuka, kami juga akan melakukan rebranding partai, penyegaran partai, sederhananya apa? PSI akan ganti logo. Logonya jadi apa? Tunggu tanggal 19," ujar Andy.

Andy melanjutkan, Kongres PSI di Solo juga akan mengundang Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi). Jokowi akan mengisi sesi diskusi bersama pengurus dan kader PSI. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga direncanakan hadir dalam Kongres PSI itu.

Kehadiran Jokowi dalam kongres tersebut dipastikan untuk mengisi satu sesi diskusi terbuka bersama para kader PSI. Beny menyampaikan bahwa Jokowi telah mengonfirmasi keahadirannya dalam agenda tersebut. "Pak Jokowi akan hadir nanti di tanggal 19 (Juli) untuk berdiskusi dengan seluruh peserta Kongres," ujar Beny.

Kemudian, Andy Budiman menyatakan bahwa sesi diskusi dengan Jokowi akan digelar secara terbuka. Forum ini memungkinkan peserta dan media untuk menyimak langsung jalannya diskusi. "Itu akan menjadi forum terbuka. Silakan teman-teman datang untuk bisa membuat berita secara langsung, apapun boleh. Itu memang forum terbuka," kata Andy.

Sementara itu, Presiden Prabowo akan memberikan arahnya kepada para kader PSI. Selain itu, kata dia, Prabowo juga akan menutup kegiatan kongres. "Iya kita undang untuk memberikan arahan dan semangat kepada seluruh kader PSI, sekaligus menutup Kongres PSI," ujarnya. (rls,ist/lut)

"Seluruh anggota yang masuk DPT dapat memberikan suaranya secara daring untuk memilih Ketua Umum PSI yang baru melalui situs vote.psi.id. Tata cara memilih juga sangat muda sehingga semua anggota bisa menggunakan haknya dengan baik. Kami menghimbau seluruh anggota yang sudah terverifikasi agar menggunakan hak suaranya sebelum batas waktu 18 Juli pukul 00.00 WIB,"

**BENIDIKTUS
PAPA**

Sekretaris Steering
Committee Kongres PSI

BADAN PENYELENGGARA HAJI TOLAK WACANA JAMA'AH PAKAI KAPAL LAUT

Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menegaskan menolak wacana pemberangkatan calon jamaah haji menggunakan kapal laut sebagai salah satu alternatif transportasi untuk musim haji 1447 Hijriah. Usulan ini dinilai tak sesuai target menekan biaya haji dan mengurangi masa tinggal.



(Ilustrasi) Hingga data terakhir, masih ada 46 jamaah Indonesia yang dirawat di berbagai Rumah Sakit Arab Saudi. (dok)

Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan pemerintah sedang menjajaki peluang membuka pelaksanaan ibadah haji lewat jalur laut. Ide tersebut langsung menuai pro-kontra.

"Betul, BP Haji tidak setuju keberangkatan haji menggunakan kapal laut," kata Tenaga Ahli BP Haji Ichsan Marsha di Kota Padang, Sumatera Barat, Sabtu (12/7/2025).

Hal tersebut disampaikan Ichsan menanggapi adanya usulan atau pernyataan yang disampaikan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar terkait wacana pemberangkatan calon jamaah haji menggunakan kapal sebagai opsi alternatif selain pesawat terbang.

Menurut Ichsan, gagasan atau ide pemberangkatan calon jamaah haji menggunakan kapal laut bertolak belakang dengan semangat yang sedang dibangun BP Haji untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Dengan menggunakan kapal laut, kata dia, maka otomatis hal itu berdampak kepada lamanya waktu perjalanan calon jamaah haji dari Indonesia hingga tiba di Arab Saudi. Selain itu usulan tersebut dinilai juga tidak ekonomis.

Menurutnya, jika kebijakan tersebut diimplementasikan maka turut berdampak kepada upaya Pemerintah Indonesia yang bertekad mengurangi masa tinggal jamaah selama di Tanah Suci dari 40 hari menjadi 30 hari.

Sementara di sisi lain Presiden Prabowo Subianto telah meminta BP Haji agar mencarikan solusi supaya Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) musim berikutnya diturunkan dari musim haji 2025.

"Artinya, usulan menggunakan kapal laut ini akan menggeser keinginan kita di awal tadi, seperti upaya menekan biaya haji dan mengurangi masa tinggal di Tanah Suci," jelas dia.

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan pemerintah Indonesia sedang menjajaki kemungkinan dibukanya jalur laut sebagai alternatif pemberangkatan ibadah umrah dan haji yang saat ini tengah didiskusikan dengan otoritas Arab Saudi.

"Digagas ke depan kami kira sangat prospektif memperkenalkan umrah dan haji melalui kapal laut. Kami juga kemarin berbicara dengan sejumlah pejabat-pejabat di Saudi Arabia," ujar Menag.

Mantan anggota panitia khusus atau pansus haji DPR RI tahun 2024, Luluk Nur Hamidah, mengatakan Kementerian Agama semestinya mengevaluasi pengelolaan haji lewat jalur udara ketimbang laut.

Menurut Luluk, berhaji menggunakan kapal laut hanya bisa dijadikan pilihan untuk orang-orang tertentu atau ibadah haji paket plus, bukan untuk opsi haji reguler. Ia mengatakan yang paling penting adalah membenahi angkutan udara kita. Misalnya, mempermudah transportasi udara dan memperkuat pengawasan terhadap maskapai pengangkut jemaah haji.

"Nah evaluasinya ini dulu nih, jadi bukan kemudian melompat soal kapal laut. Kecuali kalau itu tadi, jadi pakatnya ibadah haji plus, misalnya turisme," kata Luluk saat ditemui di acara rapat kerja nasional Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) di Jakarta Selatan, Minggu (13/7/2025).

Didorong Naik Status Jadi Kementerian Haji dan Umrah

MANTAN Anggota DPR, Luluk Nur Hamidah, mendorong agar Badan Pengelola Haji ditingkatkan statusnya menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Tujuannya untuk meningkatkan posisi tawar (bargaining position) penyelenggaraan haji Indonesia di tingkat internasional, terutama terhadap Pemerintah Arab Saudi.

"Selama ini sudah ada Badan Pengelola Haji, nah itu harus dijadikan kementerian," ujarnya, Minggu (13/7/2025). Menurut Luluk, jika masih berbentuk badan, dikhawatirkan akan mendapat perlakuan berbeda dari Pemerintah Arab Saudi.

Sedangkan jika kementerian, akan dianggap setara mengingat Arab Saudi juga memiliki Kementerian Haji dan Umrah. "Kalau dikasih label Kementerian Haji dan Umrah, akan beda ceritanya," ujar mantan anggota Pansus Haji 2024 itu.

Politisi PKB itu menegaskan seluruh ikatan alumnus Pansus Haji 2024 juga akan memberikan berbagai penguatan. Termasuk bagaimana agar penyelenggaraan haji ke depan jauh lebih ramah pada perempuan dan lanjut usia (lansia).

"Jadi, pelayanan itu benar-benar memang dilakukan, bukan cuma jargon atau slogan seperti kemarin-kemarin," ucapnya. Luluk meminta berbagai evaluasi oleh Pemerintah Arab Saudi terhadap penyelenggara ibadah haji Indonesia hendaknya dipertimbangkan.

Tujuannya agar penyelenggara ibadah haji Indonesia tidak mengulang kesalahan-kesalahan yang sama setiap tahunnya. Terutama pada saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), serta soal pelayanan dan administrasi jamaah.

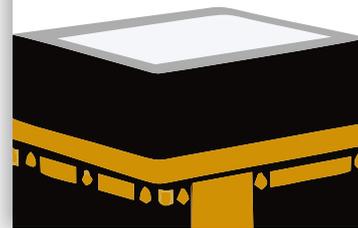
Luluk juga menyampaikan

Luluk mengatakan berhaji lewat jalur laut bisa saja dijadikan opsi lewat biro haji. Sebab, kata dia, memang ada orang yang ingin berhaji dengan meniru zaman Nabi Muhammad yang menggunakan kapal laut. Bahkan, menunaikan haji dengan berjalan kaki.

Mantan Anggota Komisi IV DPR RI ini mengatakan berhaji dengan cara lama memang semakin populer. Ia mencontohkan tiga warga negara Spanyol yang pergi haji dari Andalusia menuju Mekkah menggunakan kuda. (wid,ant,tmo,ist/dya)

PERJALANAN HAJI DENGAN KAPAL LAYAR SEBELUM ABAD KE-19

- **Tahap I: Daerah Asal ke Pelabuhan Sabang (Aceh)**
Jamaah haji memulai perjalanan dari daerah masing-masing di Nusantara menuju Pelabuhan Sabang di Aceh. Sabang menjadi titik kumpul utama karena letaknya yang strategis di ujung barat Nusantara dan memiliki pelabuhan laut dalam.
- **Tahap II: Aceh ke Pantai Gujarat (India)**
Dari Aceh, kapal layar berlayar melintasi Samudra Hindia menuju Pantai Gujarat di India. Gujarat merupakan titik singgah penting dalam rute ini, baik untuk mengambil bekal maupun menambah penumpang.
- **Tahap III: India ke Hadramaut (Yaman)**
Perjalanan dilanjutkan dari Gujarat menuju Hadramaut di Yaman. Wilayah ini juga menjadi tempat transit strategis karena letaknya dekat dengan Semenanjung Arab dan memiliki koneksi historis dan budaya dengan komunitas Muslim di Asia Tenggara.
- **Tahap IV: Hadramaut ke Jeddah (Arab Saudi)**
Tahap akhir adalah perjalanan dari Yaman menuju Pelabuhan Jeddah, gerbang laut utama menuju Kota Mekkah. Dari Jeddah, jamaah melanjutkan perjalanan darat menuju Mekkah untuk menunaikan ibadah haji.



pentingnya menuntaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haji untuk memastikan peningkatan profesionalisme seluruh petugas penyelenggaraan ibadah haji. "Ibadah haji menyangkut personel dan uang yang sangat besar, selain kenyamanan dan keselamatan jemaah," ucapnya. (wid,rla,ant/dya)

DITEMUKAN, BANGKAI KMP TUNU TERBALIK DI KEDALAMAN 49 METER

Operasi SAR gabungan pencarian KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali membuah hasil. Bangkai kapal yang karam itu terdeteksi kamera petugas penyelam dalam posisi terbalik.



Tim SAR gabungan terus melanjutkan pencarian korban kapal tenggelam KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali. (Antara)

Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas, Ribut Eko Suyatno, membenarkan dari hasil penampakan kamera bawah laut, bangkai kapal teridentifikasi dalam posisi terbalik.

"Ini sebelah kiri langsung Komandan Gugus Tempur Laut hadir di KRI Spica dan tim penyelaman bawah air yang persiapan menurunkan peralatan kamera bawah air untuk mengambil visualisasi bawah air yang alhamdulillah bisa kita dapatkan sehingga ini akan menjadi fix datum yang akan kita laporkan kepada pimpinan dalam hal ini SC dan Kementerian Perhubungan," kata Eko di Banyuwangi, Minggu (13/7/2025).

"Ini pengambilan gambar dari objek di sebelah kanan. Ini bisa kelihatan kamera larinya. Nah, ini nama kapal tertera posisi kapal terbalik. Ini data diambil di titik referensi 8," lanjutnya.

Dikatakannya, kapal tenggelam di kedalaman 49 meter di Perairan Selat Bali. "Terkait observasi bawah air tim SAR gabungan telah mengetahui titik lokasi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya yang dicurigai pada posisi referensi 8 dengan kedalaman mencapai 49 meter. Selanjutnya, akan menjadi rekomendasi bagi KNKT dan Disnav dalam upaya melaksanakan operasi salvage kapal," kata dia.

Eko meminta kepada tim navigasi Kementerian Perhubungan untuk terus memberikan data-data terkini terkait kondisi arus laut.

"Karena tadi kita mengambil ya sampling ataupun profile arus di permukaan dan di bawah permukaan pada saat sedang pasang tertinggi dan surut terendah itu memang di bawah dari hasil laporan. Namun selesai itu faktanya arus rata-rata di atas tiga not di permukaan. Sampai lima sampai tujuh ya," ujarnya.

"Ini sampling arus yang kita

lakukan di titik referensi 8. Jadi kami sampling arus itu sebagaimana mekanisme dari tim hidrografi dan angkatan laut mereka menentukan titik arus di referensi 8 yang sekarang sudah kita nyatakan sebagai fix datum," tambahnya.

Eko menyampaikan, langkah-langkah berikutnya yakni dari sistem navigasi Kementerian perhubungan harus memberikan marking data dan marking position di titik lokasi tersebut

"Mem-broadcast secara terus-menerus untuk e-broadcast-nya atau NTM, Notice To Marine, kepada seluruh pengguna kapal di Selat Bali. Sehingga tidak merusak dan

mengubah posisi bawah air," ucapnya.

Eko menerangkan upaya pencarian di hari ke-12 ini, tim SAR gabungan masih mengerahkan KRI Tongkol, KP Grantin, KN SAR Permadi, KN SAR Arjuna 229 dan beberapa Rigid Inflatable Boat (RIB).

Kapal-kapal itu disebar sektor pencarian masing-masing menuju arah selatan dari lokasi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya.

Eko pun memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh unsur SAR yang terlibat dalam Operasi SAR, baik itu di darat dan laut.

"Saya ucapkan terima kasih atas integritas seluruh komponen yang telah memberikan upaya maksimal

kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan," imbuhnya.

17 Jenazah Ditemukan

Kapal Motor Penyelberangan (KMP) Tunu Pratama Jaya rute Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali, tenggelam di Selat Bali pada Rabu (2/7/2025) pukul 23.35 WIB atau Kamis (3/7/2025) pukul 00.35 WITA.

Kapal milik PT Raputra Jaya yang membawa 53 penumpang dan 12 kru ini diduga tenggelam akibat kebocoran di ruang mesin, lalu berujung terbalik.

Pencarian korban tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali memasuki hari ke-11. Sebanyak 17 jenazah telah ditemukan, dengan 15 di antaranya berhasil diidentifikasi.

Dilansir Minggu (13/7/2025), pada hari ke-10 sejak tragedi Rabu (2/7) hingga Sabtu (12/7), Tim DVI Polda Jatim bersama instansi terkait telah menemukan 17 jenazah korban tenggelamnya KMP Tunu Jaya. Sebanyak 15 di antaranya bisa diidentifikasi.

"Berdasarkan data dari DVI Polda Jatim, sudah ada 15 jenazah korban KMP Tunu Pratama Jaya yang berhasil diidentifikasi dan 2 jenazah masih proses," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast saat dikonfirmasi. (wid,rls,ist,ant/dya)

KRI Spica TNI AL, Mampu 'Endus' hingga Kedalaman 1.000 M

KMP Tunu Pratama Jaya akhirnya ditemukan. Badan kapal terlihat dalam kondisi terbalik di kedalaman sekitar 49 meter di perairan Selat Bali.

Kapal ini tenggelam pada 2 Juli 2025. Beberapa hari kemudian, TNI AL mengerahkan KRI Spica-934 untuk membantu menemukan kapal yang membawa 65 penumpang dan kru itu.

KRI Spica memang selalu dilibatkan dalam misi pencarian bawah air. Ini memang bukan kapal selam, tapi kecanggihannya yang tersemat di dalamnya, membuat KRI Spica sangat diandalkan sebagai 'mata bawah air' TNI AL.

KRI Spica yang bertugas di Pushidrosal itu meluncur dari tempat pembuatannya, di Les Sables-d'Olonne, Prancis pada 3 Agustus 2015. Kapal dengan panjang 60 meter itu dibekali dengan dua mesin diesel 8V 4000 M53 untuk dua

propeller.

Ini memungkinkan kapal bergerak dengan kecepatan 14 knot dengan daya jelajah 4.400 nautical mile pada kecepatan 12 knots. Kapal ini mampu menghadapi gelombang laut sampai level sea state six dengan waktu berlayar sampai 20 hari.

Kapal hidro oseanografi ini mampu membawa 30 awak dan 16 personel tambahan. Inilah kemampuan utama KRI Spica dalam hal pencarian bawah laut. Ada perangkat single beam echo sounder jenis Kongsberg's EA600 dan multibeam systems EM2040 dan EM302.

Lebih canggih lagi, setiap OSV dibekali Autonomous Underwater Vehicle (AUV) tipe Kongsberg Maritime's Hugin 1000. Perangkat yang kerap disebut ROV (remotely operated vehicle) ini sanggup mengemban misi survei bawah air hingga kedalaman 1.000 meter.

Inilah yang memudahkan Tim

SAR dalam mencari objek yang dicari, seperti KMP Tunu Pratama Jaya.

Meski berstatus sebagai kapal survei, KRI Spica dibekali dengan sejumlah persenjataan, seperti meriam PSU Rheinmetall kaliber 20 mm pada haluan, serta dua pucuk SMB (senapan mesin berat) M2HB kaliber 12,7 mm di geladak buritan.

KRI Spica bukan pertama kali bertugas mencari benda di bawah air. Sebelumnya, KRI Spica pernah dilibatkan dalam pencarian Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang.

"Benar KRI Spica telah menemukan KMP Tunu Pratama Jaya. Tanggal 12 Juli 2025, pukul 11.41 WIB Tim Penyelam (Dislambair dan Kopaska) dan KRI Spica-934 melaksanakan visualisasi terhadap objek Ref No. 8 dengan kamera bawah laut," kata Kadispenal Laksma Tunggul saat dikonfirmasi, Minggu (13/7/2025). (wid,rls,ist/dya)

Hasil tangkapan kamera bawah air yang menampilkan bagian lunas KMP Tunu Pratama Jaya. (TNI AL)



Proyek Parkir Vertikal Kayutangan Dipangkas Setengah, Jadi 3 Lantai

MALANG- Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang memutuskan memangkas jumlah lantai dalam proyek pembangunan gedung parkir di kawasan Kayutangan Heritage. Dari rencana awal enam lantai, kini hanya separuhnya saja atau menjadi tiga lantai. Anggaran proyek yang berlokasi di Jalan Basuki Rahmat itu senilai hampir Rp10 miliar.

Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menyatakan proses lelang proyek kini tengah dalam tahap pemilihan penyedia jasa. Ditargetkan penandatanganan kontrak dapat dilakukan dalam waktu dekat.

"Insyaallah minggu depan kami sudah kontrak. Pekerjaannya nanti selama 140 hari," ujar pria yang akrab dengan sapaan Jaya ini, dikutip pada Minggu (13/7/2025).

Disebutkannya, konstruksi gedung parkir vertikal ini akan dibangun dengan struktur tiga lantai. Jaya mengakui, dalam perencanaan awal, proyek ini dirancang hingga enam lantai. Penyusutan jumlah lantai tersebut, menurutnya, berkaitan langsung dengan kebijakan efisiensi dan keterbatasan anggaran.

"Di awal itu enam lantai.

Anggarannya kurang lebih Rp18 miliar untuk itu. Tapi karena keterbatasan anggaran, efisiensi, begitu, lah. Jadi sekarang hanya tiga lantai. Kami sediakan anggaran Rp9 miliar koma sekian, hampir Rp10 miliar, ya," jelasnya.

Dengan pemangkasan jumlah lantai ini, kapasitas daya tampung kendaraan juga ikut berkurang. Jaya menyebut, rencana awal untuk enam lantai dapat menampung sekitar 123 unit kendaraan roda empat dan sekitar 600 unit kendaraan roda dua.

Namun, dengan hanya tiga lantai yang akan dibangun, kapasitasnya diperkirakan menjadi setengah dari perhitungan semula. "Kalau sekarang tiga lantai, untuk roda empat diperkirakan hanya 60-an unit. Kemungkinan separohnya dari rencana awal," katanya.

Meski dibangun dalam skala lebih kecil, Dishub tetap menargetkan agar gedung parkir baru ini dapat terintegrasi dengan fasilitas parkir vertikal yang telah lebih dulu berdiri di Jalan Majapahit. Penyatuan sistem keluar-masuk kendaraan dari dua gedung tersebut, dinilai penting untuk mendukung pengelolaan parkir yang

lebih efektif di kawasan Kayutangan Heritage.

"Iya, harus kami upayakan menyambung. Supaya gedung satu dengan lainnya benar-benar bermanfaat. In-outnya jadi satu," ujarnya.

Selama proses pembangunan berlangsung, area eks Bank Mandiri Syariah akan ditutup sementara dari aktivitas parkir. Sebagai alternatif, Dishub akan mengalihkan sementara kendaraan pengunjung Kayutangan Heritage, ke sejumlah titik parkir lain milik pemerintah kota.

"Jadi, sementara untuk parkir di Kayutangan, kami upayakan menggunakan parkir vertikal yang ada di Jalan Majapahit. Kami optimalkan di situ dulu," bebernya.

Selain itu, Dishub juga mempertimbangkan pemanfaatan



(Ilustrasi) Gedung parkir vertikal 3 lantai di kawasan Stadion Gajayana, Kota Malang. (Santi/Lentera)

area parkir lain seperti di pertokoan Majapahit, serta kawasan Taman Rekreasi Kota (Tarekot) untuk menampung kebutuhan kendaraan selama pembangunan berlangsung.

"Kami lihat kondisi dulu, ya. Artinya, kami memanfaatkan dengan mengoptimalkan fasilitas ruang parkir milik Pemkot dulu. Itu skenario pertama," ujarnya. (Santi/Dya)

Baru 80 Desa di Kabupaten Malang Terima Dana Desa Tahap II, Kenapa?

(Ilustrasi) Pekerjaan konstruksi jembatan di Desa Jatisari, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. (dok. Prokopim Kab Malang)



MALANG - Hingga awal Juli 2025, baru 80 desa di Kabupaten Malang yang berhasil memenuhi syarat dan menerima pencairan Dana Desa (DD) tahap II. Salah satu syarat utama pencairan dana tersebut adalah capaian kegiatan fisik yang didanai dari DD tahap I, minimal harus 60 persen. Dengan realisasi penggunaan

anggaran paling sedikit sebesar 40 persen.

"Sudah mulai penyaluran. Data terakhir kami ada 80 desa yang sudah mencairkan," ujar Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang, Ira Koeswandari, Minggu (13/7/2025).

Ira menjelaskan, ketentuan pencairan DD tahap II pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan tahap pertama. Namun, terdapat syarat teknis yang perlu dipenuhi oleh pemerintah desa, terutama terkait progres fisik dan serapan anggaran dari kegiatan yang dibiayai DD tahap I.

"Nah, yang ini sedikit berbeda dengan pencairan DD tahun-tahun sebelumnya. Mungkin juga desa-desa yang belum cair tahap duanya karena

masih berproses ini," ungkap mantan Lurah Kalirejo, Kecamatan Lawang itu.

Selain syarat capaian fisik, desa juga diwajibkan menyertakan akta notaris pendirian Koperasi Merah Putih (KMP). Namun, Ira memastikan hal tersebut tidak menjadi kendala karena seluruh desa di Kabupaten Malang sudah memiliki SK pendirian koperasi tersebut.

"Di Kabupaten Malang, Koperasi Merah Putih sudah terbentuk semuanya. Sehingga SK pendirian pun sudah dikantongi. Jadi tidak ada kendala untuk itu," jelasnya.

Ira menambahkan, total Dana Desa Kabupaten Malang tahun 2025 mencapai Rp460,06 miliar. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar Rp2,56 miliar dibanding tahun sebelumnya yang berada di angka Rp457,49 miliar. Dana tersebut dialokasikan kepada 378 desa, dengan nominal yang bervariasi sesuai ketentuan regulasi. Di pencairan DD tahap kedua ini, total anggaran yang dicairkan sebesar 40 persen dari total anggaran Dana Desa yang diterima.

"Tahun ini pagu tertinggi Dana Desa adalah Desa Pamotan, Kecamatan

Dampit, sebesar Rp2,03 miliar. Sedangkan pagu terendah diterima Desa Suwaru, Kecamatan Pagelaran, yakni Rp760 juta," sebut Ira.

Penentuan besaran pagu tersebut, lanjut Ira, mengacu pada Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024, yang mencakup alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja, dan alokasi formula.

Dari sisi pelaksanaan, pencairan DD tahap I tidak mengalami kendala berarti. Ira menyatakan seluruh proses penyaluran tahap pertama telah rampung pada pertengahan Maret 2025. Ia berharap desa-desa yang belum mencairkan tahap II dapat segera memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

Dalam pelaksanaannya, penggunaan Dana Desa tahun 2025 diprioritaskan untuk mendukung program strategis nasional di tingkat desa. Termasuk di antaranya percepatan penurunan kemiskinan ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT), peningkatan layanan dasar kesehatan desa, serta upaya pencegahan stunting. (Santi/Dya)

CHINA DIDUGA PANTAU LATIHAN MILITER AUSTRALIA-AS



Tentara Australia bersiap untuk latihan drone dalam rangka latihan militer multinasional "Talisman Sabre" di Area Pelatihan Shoalwater Bay di timur laut Australia pada tanggal 10 (Foto: Departemen Pertahanan Australia)

Pemerintah Australia menduga bahwa China akan melakukan pengintaian terhadap latihan militer skala besar yang tengah berlangsung bersama Amerika Serikat dan sejumlah sekutu lainnya. Dugaan ini juga memperkuat tuduhan yang sebelumnya dibantah keras oleh Beijing sebagai "narasi palsu", yakni bahwa China berencana membangun pangkalan militer di kawasan Pasifik Selatan.

saya di Pasifik, China berusaha mengamankan pangkalan militer di kawasan ini," kata Conroy, yang sebelumnya telah membuat penilaian yang sama.

"Kami bekerja sangat keras untuk menjadi mitra keamanan utama pilihan bagi kawasan ini, karena kami rasa itu bukanlah hal yang optimal bagi Australia." Diketahui China menandatangani pakta keamanan rahasia dengan negara Pasifik, Kepulauan Solomon, pada tahun 2022.

Meskipun detailnya belum pernah dipublikasikan, Amerika Serikat dan sekutu dekatnya, Australia, khawatir hal itu mungkin merupakan awal dari semacam pangkalan permanen China.

Australia menginginkan "kawasan yang seimbang di mana tidak ada yang didominasi dan tidak ada yang mendominasi", kata Conroy.

Kedutaan Besar China di Fiji bulan ini menegaskan klaim bahwa mereka ingin mendirikan pangkalan militer di wilayah tersebut adalah "narasi palsu" yang didorong oleh "motif tersembunyi". (AFP,ist/nei)

KONFLIK CHINA-AS

- **Perbedaan Ideologi:**
Sejak 1949, China dan AS berada di kutub ideologi berbeda: komunisme vs demokrasi liberal. AS awalnya tidak mengakui pemerintah komunis China dan mendukung Taiwan sebagai "China yang sah."
- **Perang Dingin dan Taiwan:**
AS mendukung Taiwan secara militer dan politik, memicu ketegangan dengan Beijing. AS menerapkan "ambiguitas strategis" terhadap Taiwan: tidak janji bantuan militer, tapi tetap jual senjata.
- **Pembukaan Hubungan (1970-an):**
Hubungan mulai membaik sejak kunjungan Nixon ke China (1972). Meski menjalin hubungan diplomatik pada 1979, AS tetap menjalin hubungan militer dan dagang dengan Taiwan.
- **Perdagangan dan Teknologi:**
Di era Trump, ketegangan meningkat lewat perang dagang. AS menuduh China curi kekayaan intelektual dan manipulasi perdagangan.
- **Laut China Selatan:**
China klaim hampir seluruh wilayah dan bangun pangkalan militer. AS menentang klaim ini dan kirim kapal untuk menjaga "kebebasan navigasi."
- **Isu Taiwan:**
AS semakin terbuka dukung Taiwan. China anggap ini pelanggaran prinsip "Satu China" dan ancam gunakan kekuatan jika Taiwan merdeka.
- **Hak Asasi Manusia:**
AS kritik pelanggaran HAM di Xinjiang, Tibet, dan Hong Kong. China tuding AS ikut campur urusan dalam negeri.
- **Teknologi dan Keamanan:**
AS larang perusahaan China seperti Huawei dan TikTok. China anggap ini sabotase dan pembatasan tidak adil.

Sekutu Diminta Perjelas Peran dalam Potensi Konflik

Pernyataan itu disampaikan seorang Menteri Industri Pertahanan dan Urusan Kepulauan Pasifik Australia Pat Conroy saat Perdana Menteri Anthony Albanese melakukan kunjungan selama enam hari ke China untuk memperkuat hubungan dagang yang baru saja diperbaiki.

"Militer China telah mengamati latihan-latihan ini sejak 2017 dan akan sangat tidak biasa jika mereka tidak melakukannya kali ini," kata Pat Conroy, dikutip AFP, Minggu (13/7/2025).

Diketahui, lebih dari 30.000 personel militer dari 19 negara akan bergabung dalam latihan tahunan Talisman Sabre mulai hari ini di seluruh Australia dan Papua Nugini. Conroy mengatakan pihaknya akan memantau keberadaan dan aktivitas China terkait hal itu.

"Kami tentu akan mengamati aktivitas mereka dan memantau keberadaan mereka di sekitar Australia," katanya kepada lembaga penyiaran publik Australia, ABC.

"Orang-orang mengamati latihan-latihan ini untuk mengumpulkan informasi intelijen seputar prosedur, spektrum elektronik, dan penggunaan komunikasi, dan kami akan menyesuainya agar dapat mengelola kebocoran tersebut," sambungnya.

Kawasan Pasifik Selatan yang strategis ini berada di pusat perebutan pengaruh diplomatik yang mengadu China dengan para pesaing Baratnya.

"Kita melihat dalam portofolio

Departemen Pertahanan Amerika Serikat meminta Jepang dan Australia untuk memberikan dukungan dalam mengantisipasi kemungkinan konflik dengan China terkait Taiwan, sekaligus mendorong peningkatan belanja militer. Laporan ini disampaikan oleh Financial Times pada Sabtu (12/7/2025), berdasarkan keterangan dari beberapa sumber yang mengetahui isi pertemuan tersebut.

Menurut laporan tersebut, Pentagon mendesak Jepang dan Australia untuk secara jelas mendefinisikan peran masing-masing jika terjadi perang antara AS dan China akibat isu Taiwan. Permintaan itu disampaikan Kepala Kebijakan Pentagon, Elbridge Colby, dalam pertemuan baru-baru ini dengan pejabat pertahanan dari kedua negara sekutu tersebut.

Dalam pertemuan itu, para pihak membahas cara-cara untuk "mengintensifkan dan mempercepat upaya memperkuat pencegahan secara seimbang dan adil," menurut seorang pejabat Pentagon.

Amerika Serikat juga meminta Jepang dan Australia untuk meningkatkan belanja militer mereka, merespons potensi ancaman dari China. Pemerintahan Presiden

Donald Trump meyakini bahwa kedua negara sekutu tersebut akan lebih cepat menaikkan anggaran pertahanannya dibandingkan negara-negara Eropa.

Salah satu sumber mengatakan, Departemen Pertahanan AS telah melihat tanda-tanda positif bahwa Jepang dan Australia mulai meningkatkan belanja militernya. Namun, AS tetap menekankan pentingnya hasil nyata dari peningkatan tersebut.

Seorang pejabat pertahanan AS menegaskan bahwa tujuan utama dari pembicaraan ini adalah memperkuat pencegahan militer guna mendukung diplomasi dan menjaga perdamaian, bukan untuk memicu konflik. "Kami tidak mencari perang. Kami juga tidak berniat mendominasi China. Tujuan kami adalah memastikan bahwa AS dan sekutunya memiliki kekuatan militer untuk mendukung diplomasi," katanya.

Pembicaraan juga mencakup ajakan agar Jepang dan Australia meningkatkan kesiapan operasional mereka. Namun, permintaan komitmen eksplisit terkait kemungkinan konflik atas Taiwan disebut sebagai langkah baru dari AS.

"Perencanaan operasional dan

latihan yang berkaitan langsung dengan kemungkinan konflik di Taiwan sedang dilakukan bersama Jepang dan Australia," ujar salah satu sumber. "Namun, permintaan komitmen ini mengejutkan Tokyo dan Canberra karena AS sendiri belum memberikan jaminan eksplisit untuk membela Taiwan." (Financial Times, Antara, ABC, ist/nei)

Main Ponsel Sebelum Tidur Ancaman Bagi Kesehatan

Penggunaan ponsel pintar telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Banyak orang bahkan terbiasa memainkan ponsel sebelum tidur, hingga tak jarang tertidur dalam keadaan masih menggenggamnya. Padahal, kebiasaan ini dapat menimbulkan efek negatif bagi kesehatan tubuh secara perlahan.

Berikut ini sejumlah efek negatif dari kebiasaan bermain ponsel sebelum tidur yang seharusnya menjadi alasan kuat untuk segera menguranginya atau menghentikannya sama sekali.

Meningkatkan Risiko Insomnia

DW melaporkan, dalam sebuah survei yang dilakukan kepada 45.000 warga Norwegia, satu jam penggunaan ponsel sebelum tidur akan meningkatkan risiko insomnia sebesar 59 persen. Dalam penelitian tersebut, terlepas apa pun yang dilakukan dengan ponsel pintarnya, kegiatan tersebut memberikan dampak kepada pola tidur manusia.

"Kami tidak menemukan perbedaan yang signifikan antara media sosial dan aktivitas layar lainnya, menunjukkan bahwa penggunaan layar itu sendiri adalah faktor kunci dalam gangguan tidur," ucap Johnsen Hjetland dari Institut Kesehatan Masyarakat Norwegia sebagai peneliti utama di dalamnya. Rusaknya pola tidur tersebut akibat cahaya layar ponsel yang mengelabui otak dan tubuh.

Merusak Daya Ingat Otak

Dalam salah satu laporan penelitian National Institutes of Health, disebutkan jika penggunaan ponsel sebelum tidur mengakibatkan rusaknya pola tidur dan berdampak pada gangguan daya ingat otak.

Penurunan kemampuan kognitif ini mereka teliti dan menemukan bahwasannya dengan adanya pengurangan penggunaan layar ponsel selama 4 minggu, terjadi peningkatan kemampuan memori seseorang.

Terlebih lagi, mereka menyebutkan bahwa anak-anak dan remaja menjadi kelompok yang paling penting untuk membatasi penggunaan layar ponsel sebelum tidur. Dengan demikian, pola tidur jauh lebih baik dan mendapatkan tidur yang nyaman untuk meningkatkan kemampuan kognitif dan daya ingat emosi tubuh pula.

Pengaruh Terhadap Kesehatan Mental

Dikutip dari National Institutes of Health, Sara Thomee dalam penelitiannya menyampaikan bahwa depresi menjadi salah satu dampak yang paling sering muncul di kalangan orang dewasa yang memiliki tingkat penggunaan ponsel yang tinggi. Di lain sisi, penggunaan ponsel sebelum tidur yang mengakibatkan turunnya 24 menit waktu tidur dalam setiap 1 jam penggunaan ponsel juga turut menyumbangkan gejala depresi bagi tubuh.

Menyebabkan Gangguan Mata

Pasti banyak yang sadar nih saat membuka handphone atau sosial media, tanpa terasa kamu sudah menghabiskan waktu selama berjam-jam. Kebiasaan ini bisa memicu computer vision syndrome. Gejalanya dapat berupa rasa lelah pada mata, penglihatan kabur, mata merah, mata kering, hingga sakit kepala. Selain itu, sering menghabiskan banyak waktu

dengan bermain ponsel sebelum tidur juga bisa menyebabkan degenerasi makula. Kalau diabaikan, kondisi ini akan meningkatkan risikomu mengalami kebutaan.

Paparan Cahaya Biru Menurunkan Melatonin

Salah satu bahaya dari main HP sebelum tidur ialah menurunnya melatonin. Melatonin adalah hormon yang otak hasilkan saat kondisi gelap. Melatonin membantu mengatur ritme sirkadian, termasuk mekanisme tidur dan bangun. Ketika Anda bermain HP sebelum tidur, otak menganggap cahaya biru dari HP sebagai cahaya pada siang hari. Akibatnya, kadar melatonin menurun sehingga menjadi penyebab insomnia, gangguan mood, dan menurunnya kualitas tidur.

Menghambat Fase Rapid Eye Movement (REM)

Rapid eye movement (REM) merupakan fase tidur yang ditandai dengan meningkatnya aktivitas otak, pergerakan mata, dan detak jantung. Pada fase inilah Anda tertidur lelap dan bermimpi. Fase REM biasanya dimulai sekitar 90 menit setelah Anda tertidur. Sayangnya, pikiran yang terganggu karena terlalu sering main HP sebelum tidur bisa menghambat

fase REM. Akibatnya, akan lebih sulit bagi Anda untuk tidur nyenyak.

Membuat Lelah Saat Bangun Tidur

Main HP sebelum tidur memang tidak menimbulkan bahaya langsung bagi kesehatan. Namun, dalam jangka panjang, kualitas tidur yang menurun dapat membuat Anda lelah setiap bangun tidur. Anda mungkin jadi tidak memiliki energi untuk beraktivitas dan lebih mudah mengantuk pada siang hari. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, Anda tentu akan kesulitan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari.

Memicu Doomscrolling

Menelusuri media sosial sebelum tidur, apalagi jika dilakukan dalam waktu yang lama, mungkin saja dapat membuatmu tidak berhenti membaca berita buruk dan terus mencari kelanjutan informasi tersebut.

Perilaku tersebut disebut doomscrolling. Akibatnya, kamu bisa merasa cemas, stres, takut, tertekan, hingga paranoid terhadap sekitar. Penggunaan ponsel sebelum tidur sangat berdampak pada kesehatanmu. Oleh karena itu, kamu disarankan untuk tidak main HP setidaknya 1-2 jam sebelum waktu tidur. Sebagai gantinya, kamu bisa melakukan aktivitas lain yang dinilai lebih bermanfaat bagi kesehatan dan meningkatkan kualitas tidur. *ne,ist/dya*



GALAXY WATCH8 & CLASSIC

RAMAIKAN PASAR SMARTWATCH GLOBAL

Dalam acara Galaxy Unpacked, Samsung tak hanya merilis lini ponsel lipat terbarunya, tetapi juga memperkenalkan seri smartwatch terbaru mereka, Galaxy Watch8 dan Galaxy Watch8 Classic, untuk memperkuat persaingan di pasar jam tangan pintar global.

Presiden sekaligus Pejabat Kepala Divisi Device eXperience (DX) Samsung, TM Roh, menyatakan bahwa seri Galaxy Watch8 dibekali sensor terbaru dan menawarkan pengalaman pengguna yang lebih intuitif berkat dukungan kecerdasan buatan (AI).

"Galaxy Watch8 Series menjadi titik awal menuju kehidupan yang lebih sehat dan terhubung, serta memudahkan pengguna untuk mengambil langkah nyata demi kesejahteraan pengguna," katanya dalam keterangan pers, Kamis.

Salah satu inovasi yang dihadirkan Samsung lewat seri jam tangan pintar ini adalah bantalan khas yang dulunya hanya ada di Galaxy Watch Ultra kini dihadirkan di semua seri terbaru ini.

Jam tangan pintar ini juga telah dilengkapi dengan fitur-fitur baru seperti Bedtime Guidance yang memberikan anjuran waktu optimal untuk tidur sehingga tubuh bisa beristirahat dan lebih bugar di pagi hari.

Lalu ada juga Vascluar Load, fitur ini membantu pengguna memantau tingkat stres pada sistem pembuluh darah selama tidur dan menjadi metrik pertama di kelasnya.

Bagi yang suka berlari, Samsung juga memberikan asisten bernama Running Coach yang membantu pengguna mengukur skala kebugarannya dari skala 1-10 dan

menyiapkan rencana latihan yang disesuaikan dengan kondisi tubuh.

Ada juga fitur Together yang ditingkatkan untuk para pencinta lari, dengan demikian pengguna bisa mengatur jadwal bersama keluarga dan teman saat menggunakan gawai ini.

Berikut rangkuman spesifikasi dari Galaxy Watch8 dan Galaxy Watch8 Classic

Galaxy Watch8

Galaxy Watch8 hadir dengan dua ukuran yaitu 40 mm dan 44 mm, keduanya juga menawarkan dua pilihan warna yakni Graphite dan Silver.

Untuk layarnya, kedua ukuran telah dilengkapi dengan panel layar Super AMOLED yang diklaim keduanya memiliki kecerahan 50 persen lebih baik dibandingkan pendahulunya dengan kecerahan puncak 3000 nits terutama untuk penggunaan di luar ruangan.

Sistem operasi One UI 8 juga telah dipasang di jam tangan pintar ini dengan dasar sistem operasi besutan Google yaitu WearOS 6, didukung dengan chipset Exynos W1000 yang memiliki lima inti kini Galaxy Watch8 juga bisa terhubung dengan kecerdasan artifisial Google Gemini.

Untuk memorinya, jam tangan pintar ini memiliki RAM 2GB dan memori penyimpanan berukuran 32 GB.

Dalam hal sensor pelacakan kesehatan, Samsung menyematkan sensor bernama BioActive yang dijanjikan memberi performa pemantauan yang lebih mendalam dan akurat sehingga laporan kesehatan yang diberikan lebih menyeluruh.

Pada sisi daya, Galaxy Watch8 menghadirkan baterai 435mAh untuk ukuran 44 mm, dan baterai 325 mAh untuk ukuran 40 mm. Tentunya jam tangan pintar ini telah memiliki ketahanan air dengan rating IP68 dan 5 ATM.

Galaxy Watch8 Classic

Secara umum, spesifikasi Galaxy Watch8 Classic tidak berbeda jauh dengan Galaxy Watch8 untuk dapur pacu, sistem operasi, panel layar, ketahanan, dan sensornya. Namun berbicara tentang

tampilan, Galaxy Watch8 Classic tentu tampil berbeda dengan hadirnya rotating bezel yang meningkatkan pengalaman menavigasi UI yang lebih menyenangkan.

Selain itu, hadir juga tombol pintasan cepat di bagian samping yang menawarkan akses instan ke aplikasi-aplikasi yang sering digunakan. (nei,ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH | **DESAIN GRAFIS** PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

MEDIA TERVERIFIKASI

Tren Wedding Dress: Gaun Terbuka, Undergarment Wajib Cerdas

Tahun 2025 membawa angin segar dalam dunia fashion pernikahan. Gaun-gaun pengantin kini semakin menggabungkan keanggunan klasik dengan detail modern, menghadirkan siluet yang memancarkan kepercayaan diri, kemewahan, dan keunikan. Dari potongan yang memperlihatkan punggung hingga desain transparan yang memikat, semuanya bertujuan menciptakan tampilan tak terlupakan di hari yang sangat istimewa.

Namun, tampil maksimal di hari pernikahan bukan hanya soal gaun yang indah. Dukungan dari pakaian dalam yang tepat juga berperan besar untuk menjaga kenyamanan, postur, dan ketenangan sepanjang hari.

Deep V Neckline

Gaun pengantin dengan potongan V-neck menjadi salah satu tren yang di highlight tahun ini. Potongan yang dalam dan tajam di bagian depan menawarkan perpaduan antara keanggunan dan sensualitas. Selain menambahkan kesan modern, gaya gaun ini juga sangat versatile yang cocok untuk berbagai jenis tubuh. Untuk bentuk dada yang lebih terisi dan terangkat secara maksimal saat mengenakan gaun fitted dengan deep V-Neckline.

Supaya bentuk dada tampak terangkat dan seimbang dengan siluet gaun, banyak calon pengantin memilih penunjang gaun yang praktis dan tidak terlihat.

Open Back & Backless

Melirik deretan gaun pengantin yang jadi tren di tahun 2025. Berbicara tentang tren gaun pernikahan, gaya

open back dan backless bukanlah konsep yang asing.

Gaya ini seringkali dipilih oleh mempelai wanita untuk menambahkan sedikit sentuhan dramatis pada gaun dan tetap memberikan kesan elegan. Sesuai dengan beragam tema, mulai dari timeless minimalis, hingga modern dan berani - potongan open back dan backless are here to stay in 2025! Untuk menunjang tampilan gaya gaun ini, banyak pengantin mencari solusi bra yang tidak terlihat namun tetap memberi kesan fuller di bagian dada.

Sheer & Illusion Fabrics

Bahan-bahan berlapis tipis seperti renda, tulle, dan mesh transparan kembali menjadi pusat perhatian dalam tren gaun pengantin tahun 2025. Kain-kain ini kerap digunakan sebagai elemen utama untuk menciptakan tampilan yang lembut, ringan, dan ethereal, menghadirkan kesan romantis dan anggun. Transparansi yang halus dari material ini memberi sentuhan magis tanpa terkesan terlalu terbuka, sehingga cocok dipilih oleh pengantin yang ingin tampil feminin namun tetap elegan.

Para desainer banyak bereksperimen dengan cara memadukan lapisan-lapisan ini, baik untuk bagian lengan, bahu, maupun seluruh permukaan gaun. Renda berpola rumit di atas tulle transparan, misalnya, memberikan efek visual yang cantik dan berdimensi.

Off-Shoulder & Strapless

Melirik deretan gaun pengantin yang jadi tren di tahun 2025. Potongan ini tidak pernah ketinggalan zaman, selalu berhasil memberikan kesan

romantis dan timeless.

Tidak hanya di tahun 2025, gaya ini telah digemari oleh banyak mempelai wanita sejak beberapa tahun lalu karena selain menonjolkan bagian atas dengan elegan, gaya ini dapat dipadukan dengan berbagai siluet, mulai dari ball gown hingga desain minimalis yang ramping.

Supaya tetap nyaman bergerak tanpa khawatir bra terlihat atau melorot, calon pengantin kini lebih sering mengandalkan supportive inserts yang tidak memerlukan tali atau penyesuaian tambahan pada gaun. Pilihan seperti ini biasanya juga dirancang tahan keringat dan nyaman dipakai dalam waktu lama.

Melirik deretan gaun pengantin yang jadi tren di tahun 2025.

Potongan ini tidak pernah ketinggalan zaman, selalu berhasil memberikan kesan romantis dan timeless.

Tidak hanya di tahun 2025, gaya ini telah digemari oleh banyak mempelai wanita sejak beberapa tahun lalu karena selain menonjolkan bagian atas dengan elegan, gaya ini dapat dipadukan dengan berbagai siluet, mulai dari ball gown hingga desain minimalis yang ramping.

Fit & Flare

Gaya potongan gaun ini menjadi favorit banyak desainer pada tahun 2025 karena siluetnya yang anggun dan memukau. Potongannya menonjolkan bentuk tubuh secara elegan, dengan desain korset yang membentuk bagian atas tubuh dan potongan melebar di bawah pinggul, menciptakan kesan feminin dan dramatis

yang tak lekang oleh waktu. Tidak hanya memperindah proporsi tubuh, gaya ini juga memberikan tampilan percaya diri dan berkelas bagi pemakainya. Ciri khas lain dari potongan ini adalah kemampuannya untuk dipadukan dengan berbagai model kerah atau neckline—mulai dari sweetheart, off-shoulder, hingga halter—yang masing-masing mampu menyesuaikan dengan karakter acara maupun gaya pribadi. (nei,ist/dya)



Ironi! 30 Wamen (dari Hal 1) ...

Kementerian Ke-tenagakerjaan (Kemenaker) melaporkan jumlah angkatan kerja pada 2025 ini mencapai lebih dari 149 juta orang. Data angkatan kerja tersebut diketahui meningkat sekitar 2 juta orang dibandingkan 2024 lalu.

"Pertumbuhan ini utamanya disumbang oleh lulusan baru dari tingkat SMA/SMK hingga perguruan tinggi," ujar Kepala Biro Humas Kemenaker, Sunardi Manampiar Sinaga dalam keterangannya dikutip pada Senin (2/6/2025).

Senada dengan Kemenaker, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga mencatat ada tambahan sekitar 2-3 juta angkatan kerja baru setiap tahunnya. Menurut Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani, pihaknya menilai bahwa tantangan terbesar Indonesia justru terletak pada ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja yang terus bertambah dan kemampuan pasar kerja dalam menyerapnya.

"Setiap tahun ada tambahan sekitar 2-3 juta angkatan kerja baru, sementara penyerapan lapangan kerja justru terus mengalami tekanan," tutur Shinta.

Sementara itu, Kemnaker juga mencatat ada 26.455 kasus PHK hingga 20 Mei 2025. Sementara itu, Apindo malah mencatat angka yang lebih tinggi, yaitu 73.992 kasus hingga 10 Maret 2025. Pihak buruh juga mencatat ada 70.000 kasus PHK hingga Mei 2025.

"Fenomena makin banyaknya wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan BUMN adalah sesuatu yang secara hukum memang tidak melanggar. Namun, jika dilihat dari kaca mata etika publik, ini adalah sebuah ironi besar di tengah kenyataan pahit rakyat yang masih sulit mencari pekerjaan," kata Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, Jumat (11/7/2025).

Anam menyinggung bagaimana rasa kepekaan pemerintah terhadap publik. Sebab, jutaan warga kini tak mudah mencari pekerjaan, namun justru pada pejabat memiliki lebih dari satu kewenangan.

"Saat jutaan anak muda dan kepala keluarga mengantri lowongan, negara justru memberi ruang pada segelintir elite untuk menduduki dua bahkan tiga kursi kekuasaan sekaligus. Ini bukan soal pelanggaran hukum, tapi soal kepekaan dan rasa keadilan sosial," ujar Mufti.

Karena itu, kepada para pejabat yang merangkap jabatan dia berharap harus disertai dengan hasil yang mumpuni. Bahkan, dia menandaskan DPR akan mengawasi kinerja mereka di pemerintahan. "Jangan hanya rangkap jabatan tapi nihil percepatan. Rakyat berhak melihat apakah kehadiran para pejabat ini benar-benar mampu mengakselerasi transformasi BUMN, atau justru menambah beban birokrasi yang sudah lamban," ujar Mufti.

"Kami akan terus mengawasi, apakah kehadiran wamen sebagai komisaris mampu melahirkan terobosan, efisiensi, dan lompatan kinerja, atau hanya jadi ruang elitis berbagi posisi," tambahnya.

Ia meminta wamen yang merangkap jabatan tak meninggalkan kewajiban utama. Mufti Anam menyoro ti kinerja tak maksimal merupakan bentuk pengkhianatan lantaran mereka digaji dengan uang rakyat.

"Harus bisa menjadi motor penggerak BUMN, bukan hanya penumpang di ruang rapat. Harus menghadirkan output nyata yang bisa dirasakan rakyat, baik dari efisiensi operasional, penurunan utang, hingga peningkatan kontribusi BUMN ke negara," kata legislator PDIP ini.

"Kalau wamen-komisaris hanya hadir dalam daftar gaji, tapi tidak hadir dalam daftar kinerja, maka ini adalah bentuk pengkhianatan kepercayaan publik," sambungnya.

Sementara itu, Koordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG,) Syafrudin Budiman, menilai rangkap jabatan tersebut melanggar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 80/PUU-XVII/2019MK tentang Wakil Menteri (Wamen) dilarang rangkap jabatan pada perusahaan negara atau swasta. Selain itu juga melanggar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU 25/2009), TAP MPR Nomor VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan tata pemerintahan Good and Clean Governance (GCG).

"Keputusan mengangkat 30 Wamen dan beberapa pejabat tinggi lainnya sebagai Komisaris BUMN telah melanggar Putusan MK, UU Pelayanan Publik, TAP MPR dan tata pemerintahan Good and Clean Governance (GCG). Kami minta kepada Presiden-Wakil Presiden dan Menteri BUMN untuk meninjau kembali soal rangkap jabatan di Komisaris BUMN," ujar Syafrudin Budiman, dalam rilisnya di akun medsos, Sabtu (11/7/2025).

Menurutnya, ARPG berkomitmen mendukung dan mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran. Dimana ARPG bukan hanya menjadi pendukung loyal Prabowo-Gibran namun juga ikut mengawasi dan mengkritisi jika ada hal yang salah di jalannya pemerintahan.

"Hari ini kita bisa melihat bahwa perekonomian mengalami kemerosotan akibat pada ketidakmampuan global. Maka dilakukan efisiensi anggaran dan kebijakan yang mengharuskan merubah proyeksi target pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu seharusnya, rangkap jabatan tidak dilakukan secara massif dan progresif," ucap Gus Din sapaan akrabnya.

Dia juga mengatakan, seharusnya pemerintah bisa merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi, Wakil Menteri dilarang rangkap jabatan pada Perusahaan negara atau swasta. Jelas bahwa jika merujuk putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019, Wakil

Menteri dilarang rangkap jabatan pada perusahaan negara atau swasta.

"Posisi jabatan Wakil Menteri sama dengan Menteri yang diangkat oleh Presiden, harus juga tunduk pada Pasal 23 huruf b UU Kementerian Negara. Yang mana regulasi ini melarang pejabat negara merangkap jabatan," tegas Mantan Aktivistis 98 asal Surabaya ini.

Dia mengatakan argumentasi MK sangat rasional dan dapat diterima agar Wakil Menteri fokus pada pekerjaan, yang memerlukan penanganan secara khusus. Di mana berdasarkan data yang ada, sudah ada 30 Wakil Menteri dan beberapa pejabat tinggi lainnya yang merangkap jadi Komisaris BUMN.

"Jika dipantau menyeluruh banyak yang merangkap jabatan di Kementerian BUMN. Terdiri dari Wakil Menteri, Pejabat Tinggi Madya, Staf Ahli, Staf Khusus, dan Pejabat Tinggi Pratama orang mendapatkan jabatan sebagai komisaris atau dewan pengawas. Baik itu di BUMN maupun anak perusahaannya," ungkap Gus Din.

Kemudian Gus Din menjelaskan, ada beberapa alasan sejumlah yang memiliki dasar hukum, untuk menolak kebijakan rangkap jabatan pada komisaris dan dewan pengawas di BUMN. Karena rangkap jabatan bertentangan dengan hukum positif di Indonesia.

"Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU 25/2009) secara spesifik menyebutkan bahwa pelaksana pelayanan publik dilarang merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah," jelasnya.

Selanjutnya kata Gus Din, rangkap jabatan juga dipandang melanggar etika, sebagaimana dituangkan dalam TAP MPR Nomor VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

"Dalam TAP MPR VI Tahun 2021 bagian Etika Politik dan Pemerintahan, disampaikan bahwa tujuan penegakan etika untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan menjunjung tinggi kepentingan publik," kata dia.

Rangkap jabatan bisa menimbulkan potensi konflik kepentingan serta menyoal keterbatasan dalam melakukan pelayanan publik. Karena itu, harus dipandang sebagai perbuatan yang melanggar etika.

"Bahkan juga rangkap jabatan berpotensi menghasilkan situasi diskriminatif antar birokrat, khususnya dalam kaitan dengan pendapatan ganda, hingga berpotensi menyebabkan terganggunya profesionalitas. Sebab, menimbulkan tuntutan mengenai loyalitas terhadap masing-masing tempat lembaga yang bersangkutan bekerja," ujarnya.

Rangkap jabatan akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat antara regulator (red-Kementerian BUMN) dengan peserta bisnis. Bahkan juga bisa mengganggu

penerapan prinsip GCG.

"Ada tiga nilai dari GCG yang dilanggar dengan tetap dibiarkannya rangkap jabatan. Yaitu pertanggungjawaban, keterbukaan, dan kemandirian," pungkas Gus Din.

Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, juga mengeluarkan pandangan keras terhadap rangkap jabatan para pejabat tersebut. Dia menilai sebagai hal yang tidak etis dan rawan konflik kepentingan.

Menurutnya fenomena seperti ini semakin menguatkan bahwa konflik kepentingan di pemerintah dibiarkan tumbuh. Kondisi ini, lanjutnya, bisa menjadi sangat berbahaya dan bisa mencederai integritas institusi itu sendiri.

"Rangkap jabatan ini bukan sekadar soal gaji tambahan atau prestise simbolik. Ini adalah persoalan mendasar tata kelola negara. Seorang wakil menteri atau pejabat kementerian memiliki kewenangan regulatif dan administratif. Ketika orang yang sama duduk sebagai komisaris, maka ia menjadi bagian dari struktur yang seharusnya ia awasi," ujar Achmad..

"Tidak ada mekanisme check and balance yang sehat ketika pengawas juga merangkap sebagai pelaksana," lanjutnya.

Achmad juga menyebut praktik rangkap jabatan membuat semangat reformasi birokrasi memudar. Padahal menurutnya pemisahan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif penting untuk menjaga agar tidak ada satu aktor yang memiliki kuasa absolut.

"Rangkap jabatan pejabat negara dengan komisaris BUMN adalah anomali terhadap prinsip ini. Negara bukan korporasi pribadi. BUMN bukan kendaraan politik. Pejabat publik adalah pelayan, bukan pemilih. Jika prinsip ini kita sepakati bersama, maka rangkap jabatan harus dihentikan. Tidak ada argumen efisiensi atau sinergi yang cukup kuat untuk membenarkan praktik yang membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan," katanya.

Sementara itu, Kepala Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi, mengatakan bahwa Wamen yang rangkap jabatan menjadi Komisaris tak melanggar aturan. "Yang jelas sampai hari ini, di putusan MK nomor 80 tahun 2019, tidak ada bunyi putusan yang melarang itu. Itu clear. Di pertimbangan ada kata-kata yang seperti itu, tapi dalam putusan tidak ada," tegas Hasan.

Hasan menegaskan bahwa gugatan di MK merupakan hak konstitusional warga. Menurutnya, jika anggota kabinet, hingga kepala PCO, memang tidak dibolehkan untuk rangkap jabatan. "Menteri Sekretaris Negara enggak boleh memang. Tapi wakilnya itu dibolehkan secara aturan," ujarnya.

"Karena dalam putusan nomor 80 tahun 2019 itu, tidak ada pernyataan bahwa wakil menteri tidak boleh menangkap jabatan," tandas Hasan. (rls,ist/lut)

LAPORAN JOKOWI NAIK KE PENYIDIKAN, SIAPA TERSANGKANYA?

Polda Metro Jaya menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan atas laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terkait dugaan fitnah atau pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu. Namun, penyidik belum menetapkan tersangka.



Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komses Ade Ary Syam Indradi. (Ipol.id)

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komses Ade Ary Syam Indradi, menyampaikan bahwa berdasarkan gelar perkara mendapat kesimpulan adanya dugaan peristiwa pidana. "Bahwa kemarin hari Kamis, tanggal 10 Juli pukul 18.45, penyidik telah melakukan gelar perkara terhadap 6 laporan polisi yang sedang ditangani. Penyidik Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya," ujarnya Jumat (11/7/2025).

"Berdasarkan hasil gelar perkara terhadap LP Pertama, pelapornya adalah Ir HJW. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilaksanakan dalam gelar perkara, disimpulkan ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan," jelas Ade Ary.

Meski sudah pada tahap penyidikan namun penyidik Subdit Keamanan Negara Kamneg Ditreskrimum belum menetapkan tersangkanya. "Di tahap penyidikan adalah tujuannya untuk mengungkap siapa, membuat terang peristiwa pidana, dan mengungkap siapa tersangkanya dan inilah di tahap kedua sekarang ini," katanya lagi.

Dia juga menandakan bahwa penyidik membuka peluang untuk kembali memanggil Jokowi untuk pemeriksaan atas kasus ini. Meski demikian, belum ada kepastian kapan memanggil Jokowi.

"Nanti coba kami pastikan jadwalnya. Tentunya saksi-saksi, korban, saksi-saksi dari pihak korban kemudian nanti ada dugaan terlapor dan lain sebagainya saksi-saksi dari pihak terlapor itu akan dilakukan pemeriksaan dalam tahap penyidikan," kata Ade Ary.

Untuk diketahui, dalam dugaan pencemaran nama baik ini, Jokowi melaporkan lima orang ke Polda Metro Jaya. Kelima orang tersebut

adalah Pakar Telematika Roy Suryo, Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Eggi Sudjana, Ahli Digital Forensik Rismon Hasiholan Sianipar, Dokter Tifausia Tyassuma, dan Kurnia Tri Royani.

Jokowi melaporkan mereka atas dugaan pelanggaran Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik, Pasal 311 KUHP tentang fitnah, serta Pasal 305 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Atas naiknya status ke penyidikan atas laporan tersebut, kuasa hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara, mengatakan bahwa laporan yang dilayangkan Jokowi itu mengandung kebenaran.

"Ditingkatkannya ke tahap penyidikan menandakan pengaduan yang disampaikan Pak Jokowi mengandung kebenaran dan merupakan tindak pidana," kata Rivai saat dihubungi, Jumat (11/7/2025).

Dia menandakan akan mengawal kasus tersebut hingga ke pengadilan dan mendapatkan kepastian hukum. Dia juga berharap nama baik Jokowi yang tercoreng atas tudingan ijazah palsu tersebut terpulihkan. "Dengan upaya hukum tersebut Pak Jokowi

mengharapkan nama baiknya dipulihkan dan keaslian ijazah dikukuhkan pengadilan," ucapnya.

Sementara itu, sebagai pihak terlapor, Roy Suryo mengatakan bahwa dia akan tetap fokus mengungkap dan membuktikan kalau ijazah tersebut palsu. Dia menandakan TPUA masih fokus menjalani kasus ini untuk pembuktian.

Menurutnya sangat wajar ketika penyidik mengupayakan permintaan dari Jokowi sebagai pelapor dalam kasus ini. Namun, dia meminta agar hal terlapor juga dipandang yang sama.

"Dan kita juga bisa lihat nanti fakta-fakta apa yang bisa kita ungkapkan, kemudian apa yang bisa digali. Karena sebenarnya masyarakat juga bisa menilai kok gitu, fakta-fakta apa yang sudah terungkap, dan kelucuan atau keganjilan apa sampai ke level," kata dia Minggu (12/7/2025).

Roy pun tetap bertekad membuktikan tudingan jika ijazah Jokowi palsu. Karena dia yakin apa yang telah dipaparkan pihaknya seharusnya bisa dijadikan bukti untuk menunjukkan kejanggalan dari Ijazah

Jokowi.

"Saya percaya penuh, sebenarnya fakta-fakta itu, atau bukti-bukti itu sebenarnya lock and clear ya. Hanya saja mungkin perlu waktu untuk kemudian membuktikan ke depan masyarakat yang masih harus berpikir," ujarnya.

Dokter Tifausia Tyassuma atau akrab disapa dokter Tifa juga mengatakan bertekad untuk mengungkap bahwa ijazah Jokowi palsu. Dia menyampaikan salah satu bukti ijazah Jokowi palsu adalah pada waktu pelaksanaan kuliah kerja nyata (KKN) dan kelulusan yang terjadi pada tahun yang sama.

Menurutnya, kesamaan tahun KKN dengan kelulusan itu sangat mustahil bisa terjadi. Dia menyampaikan adanya ketidaksesuaian seperti inkonsistensi, inkoherensi, atau bentuk inapropriasi lainnya.

"Seperti misalnya inkonsistensi itu pada KKN (kuliah kerja nyata). Bareskrim mengatakan, KKN itu terjadi pada akhir 1983. Ternyata, yang bersangkutan (Jokowi) mengatakan awal tahun 1985," ucapnya. (ist/lut)

"Berdasarkan hasil gelar perkara terhadap LP Pertama, pelapornya adalah Ir HJW. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilaksanakan dalam gelar perkara, disimpulkan ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan,"

KOMBES ADE ARY SYAM INDRADI
Kabid Humas Polda Metro Jaya,

KRONOLOGI SINGKAT KASUS IJAZAH JOKOWI

- Tudingan Ijazah Palsu dilontarkan oleh Roy Suryo, Eggi Sudjana, dr. Tifa, dan lainnya.
- Jokowi melapor ke Polda Metro Jaya, menuduh pencemaran nama baik & fitnah.
- 10 Juli 2025: Kasus naik ke penyidikan setelah gelar perkara.
- Belum ada tersangka, penyidik masih dalam bukti dan saksi.
- Roy Suryo & dr. Tifa tetap bersikukuh ijazah Jokowi palsu.

